

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT PETANI TRADISIONAL DI KABUPATEN PAMEKASAN

Mohammad Imam Farisi
(Universitas Terbuka)

Masyarakat petani tradisional sebagai sebuah entitas sosial, ekonomi dan kultural, serta secara turun-temurun terikat oleh tradisi dan kesadaran bersama sebagai "identitas primordialnya" (Redfield, 1982:20). Pada fitrahnya mereka juga butuh pendidikan, yang tentu dengan beragam alasan pula. Nilai, norma, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi yang "disadari atau tidak" mereka warisi dan lakukan secara turun temurun merupakan "fakta sosial" bahwa mereka sudah menerima pendidikan (*enkulturasi* atau *sosialisasi*). Secara antropologis "tidak ada manusia dan masyarakat yang terlepas atau berada di luar konteks tradisi setempat". Walaupun ada sebagian dari mereka menyimpang atau menolak keabsahan sebuah tradisi, namun pada akhirnya mereka pun akan menciptakan sebuah tradisi baru, dan ketika itu pula proses pendidikan terjadi. Karena itu salah bila dikatakan bahwa masyarakat petani tradisional yang hidup jauh di pelosok pedesaan tidak mengenal dan tidak butuh pendidikan. Oleh karena itu, akseptabilitas suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap pembangunan pendidikan lebih terletak pada tradisi yang dibawa di dalam proses pendidikan itu sendiri. Setiap pendidikan niscaya membawa nilai, norma, dan prinsip yang mendasari aktivitasnya, yang bisa saja selaras atau bertentangan dengan tradisi masyarakat setempat yang menjadi konteks sosio-kulturalnya.

Pembangunan pendidikan bersifat multi-dimensional, tercipta dalam relasi manusia yang begitu rumit. Pembangunan pendidikan merupakan upaya yang melibatkan banyak faktor, seperti filsafat, politik, ekonomi, sosial, budaya, psikologi, bahkan juga sejarah. Makna lebih jauh dari hal tersebut adalah bahwa pembangunan pendidikan dan hasil-hasilnya banyak ditentukan oleh bekerjanya antar berbagai faktor tadi (Munandir, 1973).

Dari perspektif sejarah, pendidikan Indonesia berkembang dinamis dalam lingkungan masyarakat yang juga berkembang, baik dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Terlepas dari dasar dan arah perkembangannya, pembangunan pendidikan di Indonesia secara konsisten dijadikan sebagai sarana transformasi, transmisi, dan sosialisasi nilai-nilai, tradisi, ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni dari masyarakatnya (Depdikbud, 1996). Di kalangan teoretisi, pakar, dan praktisi pendidikan, terdapat keyakinan dan konsensus bahwa antara faktor-faktor lingkungan sosial dan budaya dengan pendidikan terdapat hubungan. Keyakinan tersebut didukung oleh banyak penelitian (lihat mis. Passow 1964; Bremberck, *et.al.* 1966; Munandir, 1973; dan Dep. P dan K, 1974).

Pembangunan suatu sistem pendidikan nasional Indonesia yang berwatak "modern" menyangkut dan bersinggungan dengan berbagai persoalan yang sangat "sensitif". Karena bersinggungan dengan perubahan di dalam "sistem sosial" (nilai, tingkah laku, kepribadian, kebudayaan, proses sosial, struktur sosial, dan pemahaman serta pengawasan tingkah laku sosial) yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat (van Scotter, 1979). Ketidakmampuan membangun suatu sistem pendidikan yang sesuai dan mengakomodasi sistem sosial masyarakat yang menjadi lokusnya, akan menyebabkan terjadinya "kemandegan budaya" (*cultural lag*) yang merupakan sumber timbulnya "kekacauan sosial" (*social disorder*) di dalam masyarakat (Vembriarto, 1971). Pendidikan tidak saja menjadi institusi bagi kemungkinan terjadinya proses "integrasi", tetapi juga bisa menjadi institusi di dalam proses "desintegrasi" masyarakat (Susanto, 1979).

Di dalam unit-unit masyarakat petani tradisional, di mana kondisi kepemilikan "imbang daya" (*power share*) antara unsur-unsur internal, pengaruh unsur-unsur internal, dengan intensitas

pengaruh luar yang sangat rendah/kecil (Dirjen PMD, 1972), serta fungsi-fungsi pelayanan pendidikan dan komunikasi/informasi ada indikasi kurang terlayani (*undeserved*) (Tim, 1995; Farisi, 1998), maka pembangunan pendidikan “formal-modern” walaupun dewasa ini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang “sama sekali asing”, tetapi masih dipandang sebagai sesuatu yang “inovatif”. Artinya, pendidikan sebagai sesuatu yang ‘baru’, meskipun penting bagi suatu perubahan sosial, namun difusinya tidaklah selamanya mudah. Diperlukan banyak penyesuaian (*adjustment*), adaptasi, akomodasi, dan asimilasi, untuk dapat dipercaya dan diterima sebagai suatu “kebutuhan” atau “keniscayaan”, serta melahirkan “partisipasi sosial”, dan akhirnya mampu “memberdayakan” masyarakat setempat yang diindikasikan oleh terjadinya “perubahan sosial” yang progresif (Rogers, 1983; Rogers & Shoemaker, 1987). Dalam kaitan ini, Durkheim (Campbell, 1994) mengatakan bahwa “pendidikan adalah suatu proses sosial-budaya” di mana anak sebagai anggota masyarakat dapat mengambil segala sesuatu yang dibutuhkan dalam “hubungan sosial” (*social contact*) melalui “suatu pemberian masyarakatnya”. Titik krusial yang membedakan karakteristik pendidikan sosial masyarakat terletak pada kualitas kebudayaan yang mendukungnya. Sedangkan bagi Whitehead (Susanto, 1979), pendidikan tidak lain merupakan “seni memanfaatkan pengetahuan, dan bagaimana agar pengetahuan itu tetap lestari, serta terpelihara sehingga tidak “kehilangan daya” (*inertia*) adalah salah satu persoalan pokok pendidikan”.

Setiap pembangunan pendidikan karenanya perlu senantiasa bergayut dengan realitas sistem sosial secara keseluruhan (Durkheim, dalam Campbell, 1994), dan mengekspresikan realitas kehidupan masyarakatnya yang terbentuk sebagai hasil perpaduan antara pengalaman masa lampau, kebutuhan masa kini, dan cita-cita masa depan (Pakasi, 1979). Setiap anggota masyarakat secara keseluruhan harus memiliki jaminan penuh terhadap kesempatan berpartisipasi, berkontribusi, dan atau bekerjasama di setiap upaya pembangunan pendidikan (Dewey 1962; Pakasi, 1979). Pembangunan pendidikan yang diprogramkan harus memiliki kaitan fungsional dengan kepentingan dan kebutuhan realistik masyarakat, dan atau kaitan organis dengan sistem sosial dan budaya masyarakat setempat secara keseluruhan (Taba dalam Pakasi, 1979). Konflik sosial dan budaya perlu diminimalisasi secara edukatif dengan cara tidak mengintroduksi sesuatu yang bisa menimbulkan “centang perenang” di dalam masyarakat (Dewey; 1962; Pakasi, 1979).

Sejalan dengan itu, Rogers & Shoemaker (1987) berpendapat bahwa setiap inovasi pendidikan perlu mempertimbangkan aspek-aspek: 1) *keuntungan relatif*, baik secara sosial, budaya, ekonomis, atau yang lain, 2) *daya kompatibilitas*, artinya sejauh mana dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, gagasan/pengalaman masa lalu, dan kebutuhan masyarakat setempat, 3) kesetaraan *tingkat kompleksitas* atau kerumitan sistem pendidikan dengan tingkat kompleksitas nilai, kebutuhan, pemikiran masyarakat setempat. Hal ini berkaitan dengan persoalan, sejauh mana format pendidikan tersebut “memberi beban dan relevan” bagi masyarakat, 4) *triabilitas*, artinya sejauh mana masyarakat bisa “mencoba terlibat” di dalam proses pendidikan, dan dipandang sesuai dengan mereka; 5) *observabilitas*, yaitu pada tingkat mana hasil-hasil pembangunan pendidikan di daerahnya tersebut dapat “diamati” dan dianggap “berhasil” memenuhi kebutuhan, perkembangan, dan kemampuan masyarakat setempat.

Pendidikan nasional Indonesia jelas merupakan sebuah konstruksi "pendidikan modern" yang bersifat "*urbanistis*", yang belum tentu pula bisa cocok dan diterima oleh setiap masyarakat petani tradisional di Indonesia, yang masih bersifat "*tradisionalistis*" dan "*agraris*". Apabila nilai-nilai, norma-norma, prinsip-prinsip pendidikan modern tersebut dipaksakan, berbagai implikasi serius terhadap tatanan sosial-budaya yang ada di tingkat masyarakat pedesaan tradisional, tentu pula tak dapat dihindarkan (Tilaar, 1999:63). Walaupun dewasa ini ada kecenderungan bahwa pada masyarakat petani tradisional telah mulai "melepaskan" ikatan-ikatan "*primordialitas-tradisional*"-nya dan secara bertahap "mengikat diri" pada ikatan-ikatan "*primordialitas-modern*" dengan berupaya untuk "menjadi seperti" (*becoming*), berinvestasi, dan mengejar kemewahan materialisme-duniawi. Dengan kata lain, dewasa ini

ada indikasi bahwa telah terjadi "transisi" secara evolutif dalam gagasan, orientasi nilai dan sikap pada "sebagian" anggota masyarakat petani tradisional tertentu yang menyebabkan identitas mereka tidak lagi "homogen" tetapi "heterogen" dengan identitas komunal yang mulai "kabur". Antara lain karena pengaruh akulturasi, enkulturasi, dan difusi sosial dan kultural.

Dalam kaitan ini, ada tiga faktor ekologis yang saling terkait dalam upaya pembangunan masyarakat melalui pendidikan, yakni: (1) *budaya*, (2) *teknologi*, dan (3) *pangupajiwa* (Daldjoeni & Suyitno, 1985:34-35). *Budaya* merupakan sumber nilai, norma atau kaidah bagi manusia dalam usahanya mengubah alam demi kemanfaatannya. *Teknologi* merupakan instrumen untuk melakukan "adaptasi ekologis", dan *pangupajiwa*--dengan pola perkembangannya--menentukan taraf sosial-ekonomi yang ada. Ketiga konsep tadi secara turun-temurun telah diwariskan oleh masa lampau dan telah diuji kemampuan dan manfaatnya oleh tradisi melalui proses "diakronis". Upaya untuk mengubahnya sekalipun melalui proses "sinkronisasi" apalagi melalui proses "koersi" (pemaksaan) maka selain akan melahirkan sikap acuh, "kuasi partisipasi", bahkan bisa jadi dalam derajat tertentu justru akan melahirkan sikap penentangan.

Bagaimana ketiga faktor pendukung tadi (adaptasi ekologis, peranan tradisi, dan perjuangan hidup) secara kontekstual-lokal dan dalam derajat tertentu mengatasi ketiga faktor penghambat (latar belakang sejarah, lingkungan alam, dan kondisi sosial-ekonomi) menurut Feisal (1981) banyak bergantung pada kesadaran dan sikap masyarakat bersangkutan untuk mengembangkan "daya ubah-diri", dan tidak semata-mata melalui pemberian contoh atau keteladanan, stimulasi yang cocok, persuasi dan penerangan sebagaimana dikemukakan Koentjaraningrat (1987:73-78). Sebab, keteladanan, persuasi dan penerangan hanya berfungsi sebagai "penggalangan". Lebih lanjut Faisal (1981:37) mengemukakan, "agar daya dan potensi ubah-diri yang dimiliki oleh setiap masyarakat dapat ditumbuhkembangkan, dalam derajat tertentu, kepada mereka perlu diberi 'pelimpahan kepercayaan' (*devolution of confidence*) untuk mengambil prakarsa atau inisiatif pembangunan (termasuk pendidikan) yang secara asasi menyangkut kepentingan diri mereka sendiri disertai dengan pemberian contoh atau keteladanan, stimulasi yang cocok, persuasi dan penerangan. Jadi, bukan pelimpahan kepercayaan tanpa bimbingan (*pasrah bongkok-an*)". Meminjam konsep Mannheim (Daldjoeni & Suyitno, 1985:36) daya ubah-diri (*changing-self competencies*) perlu diletakkan dalam kerangka *wadah, peranan dan adaptasi*. Dalam konteks ini pula, pendidikan perlu dijadikan "wadah sosial" di mana setiap anggota masyarakat secara terbuka dapat mengambil dan melakukan peran di dalamnya, serta melakukan proses adaptasi-diri sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing bagi optimalisasi daya-daya dan potensi-potensi ubah-diri yang dimiliki. Tanpa itu semua, sulit kiranya masyarakat petani tradisional di pedesaan akan *welcome* terhadap pembangunan pendidikan di daerahnya. Pendidikan seperti dikatakan Adam Smith (Campbell, 1994: 186-187) dapat diharapkan menjadi institusi sosial yang memungkinkan dibangunnya kembali kohesi-kohesi sosial yang bersifat evolutif, lebih normal dan kurang memaksa.

Sebagaimana diketahui, semenjak tahun 70-an pemerintah telah melaksanakan berbagai program pembangunan pendidikan untuk memenuhi tuntutan peserta didik dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada program ekspansi "sistem pendidikan modern" ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat (Miarso, 1983; *Cukilan*, 1983); reorganisasi struktur, isi, dan postur kurikulum lembaga-lembaga pendidikan "keagamaan", seperti madrasah yang banyak berbasis di daerah-daerah pedesaan" (Steenbrink, 1986; Zimeck, 1986); pengembangan kebijakan khusus, baik dalam bentuk "*proyek Inpres*", "*pendidikan inovatif*" yang berorientasi pada upaya meningkatkan relevansi pendidikan (Miarso, 1983); dan pengembangan model "*pendidikan konvergensi*" dalam bentuk lembaga-lembaga "*pendidikan khusus*" (madrasah), khususnya pada berbagai komunitas yang masih sangat kental dengan "orientasi keagamaan".

Namun demikian, program-program tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepercayaan, kepedulian, serta partisipasi masyarakat petani (*peasant society*) yang masih kental nuansa keagamaannya (Rachman, 1986; Steenbrink, 1986). Bahkan, menurut De Queljoe (Pakasi, 1979) serangkaian program pembangunan sistem pendidikan nasional tersebut lebih menunjukkan sebagian di antara banyak “*potret kegagalan*” pemerintah di dalam upaya meyakinkan seluruh lapisan masyarakat betapa penting makna pendidikan (dasar); atau di dalam upaya membangun sistem pendidikan yang dapat mempertemukan dan mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan sosial, budaya dan ekonomis masyarakat (*the socio-cultural-economics needs of masses*) (Maulden, dalam Pakasi, 1979).

Dari sejumlah studi tentang pembangunan pendidikan di berbagai entitas masyarakat di Indonesia, diperoleh informasi bahwa berbagai “kegagalan” tersebut disebabkan oleh: 1) penerapan kebijakan pembangunan pendidikan yang “birokratis-sentralistis” yang telah melahirkan *kesenjangan kontekstual* antara kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah (Sanusi, 1992); 2) adanya inkonsistensi di dalam orientasi nilai para pelaksana pendidikan (guru) di daerah yang tidak sesuai dengan format pembangunan sistem pendidikan nasional (Farisi, 1998); 3) keketatan sikap masyarakat desa, terutama pada masyarakat di daerah-daerah tertinggal di dalam memelihara kesinambungan nilai, norma, dan tradisi sosial dan budaya setempat (Rachman, 1986; Tim, 1995; Farisi, 1998); 4) pelibatan masyarakat di dalam pembangunan pendidikan masih lebih mengesankan “formalitas”, serta sebatas pada acara pembagian rapor dan kenaikan kelas (Tim, 1995). Faktor-faktor tersebut merupakan berbagai kendala yang penuh dengan muatan sosial dan budaya.

Tulisan ini mengkaji berbagai upaya pembangunan pendidikan yang telah dilakukan bagi masyarakat petani tradisional di pedesaan, beserta persoalan-persoalan internal dan eksternal yang ada. Secara spesifik kajian akan difokuskan pada masalah: (1) sejauh mana pembangunan pendidikan bagi masyarakat petani tradisional di pedesaan sudah dilakukan; (2) bagaimana persepsi para pelaku pendidikan (guru dan kepala SD) terhadap pembangunan pendidikan yang sudah dilaksanakan; dan (3) bagaimana pula persepsi masyarakat setempat terhadap pembangunan pendidikan yang sudah dilaksanakan, serta (4) hubungan kemitraan antara masyarakat dan sekolah dalam upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan.

Untuk maksud tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan di kecamatan Pegantenan dan Palengaan di Kabupaten Pamekasan. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh sejumlah temuan empirik berkaitan dengan upaya perumusan program pembangunan pendidikan yang dipandang *acceptable, adaptable, dan comfortable* bagi masyarakat petani tradisional di kabupaten Pamekasan. Subyek penelitian terdiri dari para guru, kepala SD, Pengawas SD, anggota masyarakat (petani dan tokoh masyarakat desa). Pemilihan dan penentuan subyek penelitian dilakukan atas dasar “*sampling bertujuan*” (*purposive sampling*) (Lincoln & Guba, 1985, Bogdan & Biklen, 1992, Miles & Huberman, 1990, Moleong, 1990). Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi, yang hasilnya kemudian ditulis dalam bentuk “*catatan lapangan*” (*field notes*). Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam tulisan ini “pembangunan pendidikan” diartikan sebagai upaya sistematis, bertahap yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan guru, orang tua dan masyarakat untuk kemajuan masyarakat petani tradisional di kabupaten Pamekasan. Sedangkan “pendidikan” yang dimaksudkan adalah pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD) di masyarakat petani tradisional kabupaten Pamekasan. Sedangkan yang dimaksud “masyarakat petani tradisional” adalah kelompok-kelompok orang (petani dan tokoh masyarakat petani) yang tinggal di daerah pedesaan Pamekasan yang bermatapencaharian pokok sebagai petani yang bekerja sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya.

Kondisi Umum Pembangunan Pendidikan

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan pendidikan, secara kuantitatif telah berhasil dalam melakukan ekspansi sistem persekolahan. Sejak diterapkan Inpres (SD Inpres) mulai tahun 1971 ekstensifikasi pembangunan gedung-gedung SD telah menjangkau seluruh pelosok pedesaan. Sehingga dewasa ini tidak ada satupun desa di kedua lokasi penelitian yang tidak memiliki SD. Jenis SD yang ada adalah SD-Inpres sebanyak 46 buah, SD Kecil yaitu SD yang jumlah siswanya kecil (secara keseluruhan ± 50 orang) sebanyak 6 buah, dan SD Pamong yakni SD yang didirikan atas prakarsa masyarakat setempat dan khusus diadakan bagi warga yang akan menyelesaikan program kejar Paket, yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti. Sementara "SD swasta" sama sekali tidak terdapat di kedua kecamatan lokasi penelitian, termasuk semua kecamatan yang ada di kabupaten Pamekasan. SD-SD swasta hanya ada dan didirikan di daerah kecamatan kota, jumlahnya pun hanya dua buah (semuanya di bawah yayasan-yayasan pendidikan Islam).

Jumlah tenaga guru dan kepala SD seluruhnya berjumlah 265 orang atau sekitar 13.87% dari total guru dan kepala SD di kabupaten Pamekasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 253 orang bertugas di SD-SD Inpres, dan 12 orang guru bertugas di SD Kecil. Kecuali di SD-SD Kecil, rasio guru dan jumlah SD-Inpres tersebut tidak seimbang dan tidak terdistribusi secara merata. Ada SD yang hanya memiliki 3-4 orang guru termasuk kepala SD, tetapi ada pula yang jumlah gurunya termasuk kepala SD mencapai 7-8 orang. SD-SD yang kekurangan guru ditemukan di pelosok, sedangkan yang jumlahnya seimbang atau berlebih terdapat di SD-SD dekat kota kecamatan dan/atau di SD-SD Inti. Apabila jumlah guru disesuaikan dengan kebutuhan rasionalnya (dengan perhitungan bahwa setiap SD memiliki guru minimal sebanyak 8 orang, terdiri dari 6 orang guru kelas, 1 orang guru penjas dan seorang lagi guru agama), maka seharusnya jumlah guru di setiap SD-Inpres seharusnya berjumlah sekitar 368 orang (tidak termasuk guru di SD-Kecil yang jumlah guru termasuk kepala sekolah memang hanya antara 1-2 orang). Dengan demikian, jumlah guru SD yang ada masih terdapat kekurangan sekitar 115 orang dari rasio guru:SD yang seharusnya.

Pendidikan para guru dan kepala SD umumnya (62.1%) SPG/SGO/PGA, dan hanya terdapat sekitar 96 orang (37.9%) (tabel 1) yang telah memenuhi persyaratan minimal (D.II PGSD). Namun dari mereka yang masih belum memenuhi kualifikasi tersebut, sekitar 90-an orang guru sejak tahun akademik 2001-2002 sudah mengikuti program penyetaraan D2PGSD-UT di Pamekasan melalui program swadana. Dibandingkan dengan para guru SD di kecamatan lain kabupaten Pamekasan, persentase guru di kedua kecamatan lokasi penelitian yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal lebih tinggi atau di atas rata-rata, yang hanya sebesar 24.3% (464 orang).

Tabel 1
Jumlah Guru dan Kepala SD Berdasarkan Jenjang Kepangkatan dan Kualifikasi Pendidikannya *)

Jenjang Kepangkatan/Golongan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
	SPG/SGO/PGA	D.II	SM	S1	
II	9	25	0	0	65
III	148	45	5	12	1637
IV	0	5	1	3	208
Jumlah	157	75	6	15	253

*) data diperoleh dari Kandepdiknas dan Koordinator UT di Pamekasan

Keadaan fisik sekolah dapat dikatakan bahwa lebih dari 50%-nya dalam keadaan tidak layak

lagi ditempati kegiatan pembelajaran. Demikian pula dengan keadaan mebelernya. Hal ini kontras dengan keadaan fasilitas pembelajaran (seperti: KIT-IPA, peta, dsb) yang umumnya masih “baik”, karena memang “sangat jarang” difungsikan. Pengadaan fasilitas-fasilitas pembelajaran tersebut hampir seluruhnya berasal dari dana DOP. Namun pembelian berbagai fasilitas tersebut tidak dilakukan sendiri oleh guru atau kepala SD yang bersangkutan, melainkan dilakukan oleh Dinas P&K Kabupaten dengan cara “memotong” sebagian dari uang DOP yang seharusnya diberikan utuh ke setiap SD. Pemotongan uang DOP tersebut sebenarnya banyak dikeluhkan oleh para guru dan kepala SD, mengingat jumlah potongan lebih besar dari uang yang diterima oleh setiap SD, serta fasilitas yang dibeli dari hasil pemotongan DOP juga tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan SD-SD yang bersangkutan. Sejumlah kepala SD yang dikunjungi, menyatakan bahwa uang DOP tersebut lebih baik diserahkan langsung kepada setiap SD, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah rusak dan atau dibelikan alat-alat sekolah lain yang memang sangat dibutuhkan.

Sejak tahun anggaran 1999/2000 penerapan pola baru DOP dipandang lebih "adil" karena didasarkan atas indikator kemiskinan, jumlah siswa, keterpencilan suatu daerah, serta faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi SD masing-masing. Demikian pula dana-dana JPS-P (Jaring Pengaman Sosial Pendidikan) yang sebelumnya kurang efektif dan tidak banyak bermanfaat bagi kepentingan SD, setelah di tingkat Kabupaten dibentuk UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) yang berfungsi sebagai fasilitator dan korektor terhadap setiap bentuk penyimpangan pengalokasian dan pemanfaatan dana-dana pendidikan atas dasar berbagai pengaduan masyarakat, perubahan ke arah yang lebih baik dapat dirasakan.

Tabel 2.
Jenis dan Sumber Pengadaan Fasilitas Pembelajaran di Sekolah Dasar *)

No	Nama Fasilitas	Sumber	Keadaan/ pemanfaatan
1.	Peta dunia	DOP	Baik/jarang
2.	Peta Indonesia	DOP	Baik/jarang
3.	Peta Jawa Timur	DOP	Baik/jarang
4.	Peta Tematik	DOP	Baik/jarang
5.	Globe	DOP	Baik/jarang
6.	Kit IPA	Depdiknas dan PEQIP	Baik/jarang
7.	Peraga berhitung	DOP	Baik/jarang
8.	Mesin ketik	BP3	Baik/sering
9.	Peraga sistem tata surya	DOP	Baik/jarang
10.	Peraga bangun ruang	DOP	Baik/jarang
11.	Papan paku	DOP	Baik/jarang
12.	Papan planel	DOP	Baik/jarang
13.	Peraga rumah dan pakaian adat	Sekolah	Baik/jarang
14.	Buku pelajaran paket	Depdiknas	Baik/efektif

*) hasil observasi dan wawancara terhadap tiga Sekolah Dasar pedesaan

Perluasan layanan pendidikan dalam bentuk ekstensifikasi SD-Inpres, SD-Kecil, dan SD-Pamong tersebut, di satu sisi telah memungkinkan terjadinya "pemerataan pendidikan" (*education equity*) hingga ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Sehingga kebutuhan setiap anak usia SD akan layanan pendidikan dasar di lokasi penelitian dapat dipenuhi, serta program penuntasan wajib belajar 6 tahun pun dapat dicapai. Namun di sisi lain, juga melahirkan persoalan-persoalan baik internal maupun internal.

Secara internal—sebagai ilustrasi--kendala muncul dari para pelaku pendidikan itu sendiri (baik dari pihak guru, kepala sekolah, pengawas, maupun Depdiknas kecamatan). Kendala-kendala tersebut antara lain: (1) rendahnya kompetensi profesional dan tanggung jawab profesi, (2) menonjolnya pola-pola strukturalisme, paternalisme, pangkat/jabatan-isme, (3) kurangnya kemampuan berkreasi dan berinovasi, (4) sistem pembinaan profesi yang cenderung otoritatif dan mengedepankan aspek-aspek administratif, (4) motivasi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan yang masih rendah; budaya sekolah yang profesional dan bertanggung jawab yang juga belum kondusif, (5) kurang efektifnya institusi-institusi pembinaan profesional (PKG, KKG, KKKS, dan Gugus Sekolah), (6) belum tuntasnya dualisme kepemimpinan di tingkat pendidikan dasar terutama di tingkat kecamatan, (7) sistem promosi, progresi, dan insentif masih diwarnai praktik-praktik kolusi, korupsi, koncoisme dan birokratisasi, (8) kurikulum yang relatif sarat beban muatan, (9) prosedur rekrutmen, penempatan dan mutasi guru yang juga masih diwarnai praktik-praktik kolusi, korupsi, koncoisme, birokratisasi, (10) adanya intervensi terhadap otonomi profesi dan profesionalisme guru; masih lemahnya sistem perlindungan terhadap hak dan kewajiban profesi, merupakan variabel-variabel independen yang dalam batas-batas tertentu bersifat determinan yang dapat menghambat tercapainya visi- misi dan tujuan pembangunan pendidikan di daerah petani tradisional kabupaten Pamekasan.

Selain itu, lahirnya kebijakan "penggabungan kembali" (*re-grouping*) SD yang mulai digulirkan sejak tahun anggaran 2000/2001, yang berarti pula terjadinya "penciutan" (*cropping*) SD-SD yang jumlah siswanya (dari kelas I hingga kelas VI) kurang dari jumlah minimal yaitu 100 orang, telah melahirkan persoalan tersendiri yang cukup rumit dan bersifat pro-kontra di kalangan guru dan kepala SD. Di satu sisi, kebijakan penggabungan dan penciutan sejumlah SD bisa dipahami, baik dari sisi anggaran, ketenagaan, geografis, maupun dari sisi efektivitas dan efisiensi SD dan kerja para guru. Namun di sisi lain, mutasi ke SD lain dengan sendirinya akan membawa konsekuensi yang tidak selalu baik dan menguntungkan, baik dilihat dari sisi geografis dan terutama dari sisi "jabatan". Kekurangan siswa tampaknya bukan hanya sebagai fenomena SD-SD di pedesaan, melainkan pula di SD-SD di perkotaan. Bahkan ada sejumlah SD di perkotaan yang sekarang hanya tinggal menghabiskan sisa-sisa siswa yang ada, karena tidak ada penerimaan siswa baru. Dari informasi yang diperoleh, jumlah SD yang "terdaftar" sebagai calon yang akan dicitutkan berbeda untuk setiap kecamatan, tetapi rerata diperkirakan mencapai antara 3-4 SD untuk setiap kecamatan luar kota, sedangkan di kecamatan kota diperkirakan sebanyak 4 SD.

Secara eksternal sejumlah kendala yang muncul misalnya terutama karena masih lemah dan labilnya kepercayaan, kepedulian, partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar sekolah. Dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan masih labil. Antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SD pun masih sangat rendah atau setidaknya bersifat "setengah hati". Labilnya sikap masyarakat sekitar tempat SD di daerah pedesaan apalagi yang jauh di pedalaman selain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka, juga karena ada pandangan bahwa pendidikan SD kurang memberikan pelajaran keagamaan bagi kehidupan "kelak atau di akhirat" sehingga dianggap tidak memiliki arti penting bagi kehidupan anak-anaknya.

Dalam kaitan ini, tidak ditemukan fakta bahwa rendahnya kepedulian, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat setempat terhadap keberadaan SD, karena lebih berhasrat atau mempercayai lembaga pendidikan lain seperti madrasah atau pondok pesantren (*pondhuk*). Menurut beberapa informan tokoh masyarakat, kedua jenis lembaga pendidikan tersebut dalam pandangan masyarakat bukan sebagai dua hal yang harus dipertentangkan. Masyarakat menyadari bahwa betapapun pendidikan umum di SD tetap dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan dunia, walaupun banyak keluarga lebih memilih pendidikan pesantren/madrasah, tampaknya lebih disebabkan oleh alasan-alasan historis, sosial, dan kultural ("keberadaan *pondhuk* dan madrasah jauh lebih lama dibandingkan dengan sekolah, dan masyarakat Madura adalah *masyarakat agamis* dengan 'kepatuhan keagamaan' dan 'kepatuhan kepada *kyae*' sangat kuat, serta manfaat sekolah belum benar-benar dirasakan bagi hidup keseharian masyarakat setempat"). Dalam situasi demikian, Madrasah atau Pondok Pesantren lebih menarik dan diminati, karena di Pondok Pesantren anak-anak mereka selain mendapat "ilmu dunia" juga mendapatkan "ilmu akhirat". Ilmu akhirat inilah yang paling penting bagi anak-anak yang hidup di pedesaan.

Rendahnya akseptabilitas masyarakat setempat terhadap pendidikan tampaknya dipengaruhi oleh aspek historis, sosiologis-kultural, dan ekologis. Secara historis kendala tersebut muncul sebagai akibat terjadinya birokratisasi dan politisasi pihak pemerintah terhadap guru dan proses pendidikan. Hal ini oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai bentuk "intervensi tak langsung" terhadap masyarakat, serta telah melahirkan *stigma* yang tidak menguntungkan guna memperoleh dukungan masyarakat terhadap pembangunan pendidikan. Secara sosiologis-kultural kendala tersebut muncul sebagai akibat dari perilaku pelaksana pendidikan sendiri yang umumnya cenderung kurang menunjukkan sikap beradaptasi, dan kurang menyatu dengan masyarakat sekitar sekolah. Secara ekologis pembangunan pendidikan belum sepenuhnya menjadi "wadah sosial" di mana setiap anggota masyarakat secara terbuka dapat mengambil dan melakukan peran-peran pendidikan, serta melakukan proses adaptasi-diri sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing bagi optimalisasi daya-daya dan potensi-potensi ubah-diri yang dimiliki. Pendidikan belum sepenuhnya menjadi institusi sosial yang memungkinkan dibangunnya kembali kohesi-kohesi sosial yang bersifat evolutif, lebih normal dan kurang memaksa di kalangan masyarakat petani tradisional di Pamekasan. Selain itu, daya dukung sumber daya manusia (guru dan kepala sekolah) baik dilihat dari profesionalisme, kepemimpinan, kompetensi personal, kompetensi intelektual, kompetensi sosial, masih lemah dan tidak memungkinkan untuk mendukung otonomi pendidikan di tingkat sekolah (*School-Based Management*).

Persepsi Pelaku Pendidikan tentang Pembangunan Pendidikan

Dari hasil wawancara dengan para guru dan kepala SD, terungkap setidaknya terdapat enam aspek yang seyogianya terkandung di dalam pembangunan pendidikan, yakni: (1) pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, (2) pengembangan kurikulum, (3) peningkatan kualitas pendidikan, (4) peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab terhadap profesi, (5) peningkatan kesejahteraan guru, dan (6) pemberdayaan masyarakat.

Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, dianggap sebagai kebutuhan pembangunan pendidikan, karena sekalipun secara ekstensif gedung-gedung SD bertebaran di setiap desa (rerata antara 2-3 SD), akan tetapi kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak ditempati lagi sebagai tempat pendidikan. Buku-buku paket pelajaran untuk siswa sangat efektif dan fungsional, sekalipun belum mencapai rasio 1:1. Kit IPA sebagian sudah memadai tinggal lebih mengefektifkan pemanfaatannya. Mebeler sekolah sudah banyak yang rusak, sarana administrasi sekolah pada umumnya tidak ada, serta hampir setiap SD tidak memiliki ruang dan peralatan UKS.

Pengembangan kurikulum bagi mereka berarti bahwa perubahan atau penataan kembali kurikulum perlu didasarkan pada: (1) relevansinya dengan perkembangan jaman, (2) sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan, (3) lebih sesuai dengan perubahan situasi dan lingkungan belajar siswa, (4) sesuai dengan usia dan tingkat kematangan siswa, (5) sejalan dengan perkembangan model-model kurikulum mutakhir, (6) lebih fungsional dan bermakna bagi pribadi siswa, (7) sesuai dengan kecenderungan baru pendidikan nasional yang berorientasi pada otonomi daerah, (8) tuntutan dan kebutuhan masyarakat madani, (9) dapat lebih meningkatkan prestasi belajar siswa, (10) lebih menyeimbangkan aspek pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan, (11) dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran kebangsaan, (12) mengikuti perkembangan teori belajar mutakhir, (13) lebih sesuai dengan beban tugas guru SD yang memegang seluruh matapelajaran.

Tabel berikut adalah berbagai tanggapan guru SD terhadap perubahan kurikulum dan tingkat pencapaian target kurikulum dan daya serap siswa yang diperoleh di lima SD.

Tabel 3.
Tanggapan Guru dan Kepala SD tentang Perubahan Kurikulum Sekolah Dasar *)

No	Aspek Kurikulum	Guru	Kepala Sekolah
1.	Tujuan kurikulum	Lebih operasional dan terarah	Lebih operasional dan terarah
2.	Organisasi PB/SPB	Lebih sistematis dan tematis	Lebih sistematis dan tematis
3.	Konsep esensial (Kognitif)	Lebih terpadu, tetapi ada juga yang tersendiri	Lebih terpadu, tetapi lebih sulit dibelajarkan kepada siswa
4.	Nilai-sikap esensial (Affektif)	Tetap, belum begitu tampak	Lebih tampak, tetapi masih terdapat nilai-nilai yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat desa
5.	Keterampilan esensial (psikom)	Tetap, tidak begitu tampak	Kurang mendukung keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam kesehariannya
6.	Organisasi materi kurikulum	Lebih sistematis, tematis dan terpadu	Lebih sistematis, tematis dan terpadu
7.	Beban kurikulum	Lebih berat/sarat	Lebih berat/sarat
8.	Efektivitas kurikulum	Lebih efektif	Lebih efektif
9.	Bahan pendukung kurikulum	Belum sepenuhnya mendukung	Banyak bahan pendukung (buku paket dan peraga) yang tidak dapat digunakan karena kemampuan guru kurang dan siswa tidak biasa dan mampu menggunakan
10.	Daya serap siswa	Naik-turun sesuai dengan kondisi pembelajaran	Naik-turun sesuai dengan kondisi siswa dan pembelajaran

11.	Relevansi dengan kematangan, dan kebutuhan belajar siswa	Lebih relevan, tetapi ada juga yang kurang relevan	Kurang relevan, terlalu sulit untuk usia, kematangan dan kebutuhan belajar siswa
12.	Relevansi dengan kebutuhan masyarakat	Mungkin relevan, tetapi tidak dapat memastikan	Mungkin relevan, tetapi sulit mengaitkannya dengan lingkungan sekitar

*) diolah dari hasil wawancara dengan para guru SD

Tabel 4.
Tingkat Pencapaian Target Kurikulum dan Daya Serap Siswa Sekolah Dasar Selama Lima Tahun Terakhir *)

Tahun	Target Kurikulum (dalam %)	Daya Serap Kurikulum (dalam %)**
1995	100	74
1996	100	75
1997	100	68
1998	100	70
1999	100	68
2000	100	83
Rerata		62.57

*) hasil observasi di tiga SD

***) diambil dalam bentuk rata-rata dari tiga SD yang diobservasi

Peningkatan kualitas pendidikan. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas dalam pandangan pelaku pendidikan secara klasifikatif seyogianya ditandai oleh semakin meningkatnya: (1) pencapaian target kurikulum seperti terlihat dari daya serap siswa, (2) persentase kelulusan/kenaikan siswa, (3) prestasi belajar siswa setiap cawu, (4) proses pembelajaran (pelaksanaan kurikulum) di kelas, (5) penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang variatif, aktif dan partisipatif.

Peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab profesi. Peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab profesi merupakan hal mendasar dalam setiap upaya pembangunan pendidikan khususnya di lingkungan masyarakat petani tradisional. Kondisi profesionalisme, komitmen dan tanggung jawab profesi guru mungkin "paling memprihatinkan" dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya. Beberapa instrumentasi yang menurut para guru dan kepala SD penting untuk ditingkatkan efektivitas dan efisiensi adalah: (1) sistem progresi jabatan fungsional, (b) sistem promosi jabatan struktural, (c) pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (in-service training), (d) akreditasi sistem pelatihan dan penataran guru SD, (e) pengembangan sistem supervisi yang bersifat "klinis" daripada "otoritatif" dan "administratif", (f) fungsi dan peran institusi KKG, PKG, KKS dan Gugus Sekolah, (g) minimalisasi birokratisasi dalam profesi guru, (h) restrukturisasi sistem rekrutmen dan penempatan guru, (i) restrukturisasi beban dan struktur tugas administratif dan profesional guru, (j) pemberian otonomi kepada sekolah dalam rangka pembinaan profesi guru, serta (k) keterpaduan sistem pembinaan guru (sistem satu atap), (l) peningkatan perlindungan terhadap hak dan kewajiban profesi guru, serta (m) penciptaan "budaya sekolah" yang bertanggung jawab dan profesional.

Peningkatan kesejahteraan guru. Tidak salah bila dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan profesi guru SD paling bawah (*low income earners*) di antara profesi-profesi yang lainnya. Pendapatan mereka tidak sebanding dengan beban dan struktur tugas profesi guru SD yang memang tidak lebih ringan dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Akibatnya, dewasa ini ada indikasi kuat bahwa telah terjadi pergeseran makna guru dari sebagai “profesi” menjadi “pekerjaan” atau “matapencaharian” yang dilihat sebagai layaknya pekerjaan-pekerjaan lain yaitu “akan dilaksanakan dengan baik apabila upah yang diterima memadai”. Bukan sebuah kewenangan fungsional yang menuntut keahlian atau profesionalisme. Bagi para guru dan kepala SD, peningkatan kesejahteraan tidak melulu berarti “material/ekonomi”, melainkan pula berarti “sosial dan psikologis”. Peningkatan kesejahteraan menurut mereka perlu dilakukan melalui: (1) perubahan sistem insentif/tunjangan fungsional yang berkeadilan--melihat prestasi, beban tugas dan kepangkatan, (2) restrukturisasi sistem “kenaikan berkala”, (3) restrukturisasi “sistem penggajian” guru, (4) restrukturisasi sistem progresi karier (kenaikan pangkat/golongan dan jabatan) yang terbuka dan obyektif sesuai dengan kaidah-kaidah profesi, (5) restrukturisasi sistem promosi jabatan yang didasarkan pada norma dan etika profesi dan menekankan pada “kelayakan” dan “kepatutan”, (6) peningkatan perlindungan terhadap hak dan kewajiban profesi guru, (7) penciptaan hubungan yang bersifat kolegialisme yang didasarkan pada profesionalisme di antara sesama pemegang profesi guru atau berada di lingkungan pendidikan, (8) ekuivalensi beban dan struktur tugas profesional guru dengan beban dan struktur administratif guru, (9) penyederhanaan sistem penilaian angka kredit bagi kenaikan pangkat/jabatan guru, (10) restrukturisasi sistem rekrutmen dan penempatan guru, (11) pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (*in-service training*), (12) minimalisasi dan penghentian “sistem potongan” gaji dan insentif guru lainnya.

Pemberdayaan masyarakat. Aspek ini dipandang penting karena para guru dan kepala SD merasakan dewasa ini kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan masih rendah dan labil. Diharapkan dengan pemberdayaan masyarakat secara evolutif akan dapat mengubah dan mengangkat kembali citra guru di mata masyarakat pedesaan, menyadarkan dan memantapkan kesadaran masyarakat terhadap eksistensi, peran dan tanggung jawabnya dalam perencanaan, proses dan pengawalan pembangunan pendidikan di daerahnya, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat dan meminta dukungan (sosial dan ekonomi) bagi kepentingan sekolah (pendidikan). Sejumlah *action plan* yang menurut mereka dapat dilakukan di antaranya: (1) revitalisasi dan restrukturisasi fungsi dan peran BP3, (2) Pembentukan “*Dewan Sekolah*” dan “*Komite Sekolah*” yang beranggotakan komponen masyarakat dan sekolah, (3) pertemuan secara berkala/periodik antara pihak sekolah dengan masyarakat/orang tua siswa untuk menampung aspirasi, keluhan, harapan dan membangun kesadaran masyarakat/orang tua tentang pendidikan, (4) melibatkan masyarakat/orang tua dalam pengawasan kinerja sekolah sebagai “lembaga publik” (*public school*) melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), (5) melibatkan tokoh masyarakat dalam proses pembelajaran sebagai “*nara sumber*” (*community as a learning resources*), (6) pemberian keringanan dan subsidi kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu, (7) meningkatkan keterpaduan di tingkat lembaga antara sistem pendidikan formal (pemerintah) dan informal/non formal (keluarga dan masyarakat), (8) pengemasan dan pengembangan program sekolah yang melibatkan masyarakat di sekitar sekolah, (9) pengemasan dan pengembangan program sekolah yang melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (seperti LSM, pontren, dll) setempat, (10) melibatkan masyarakat dalam pertimbangan kebutuhan sekolah dan siswa (buku pelajaran, dll), dan (11) bekerjasama dengan Depdiknas kecamatan dan Kabupaten mendirikan “Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” (PKBM) dengan pendanaan dipikul antara pemerintah daerah dan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Persepsi Masyarakat tentang Pembangunan Pendidikan

Dalam persepsi masyarakat petani tradisional, pembangunan pendidikan dalam arti ekspansi pembangunan gedung-gedung SD-Inpres di seluruh pelosok pedesaan, pengangkatan guru-guru Inpres secara kuantitatif, serta meningkatnya kuantitas lulusan SD tetap dipandang sebagai hal penting sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan anak-anak mereka. Namun lebih dari itu, pembangunan pendidikan perlu lebih diarahkan pada upaya untuk menemukan relasi dan relevansi dengan kepentingan hidup keseharian (sosial, agama dan ekonomi) mereka.

Dari perspektif masyarakat setempat, ada tiga aspek yang dipandang perlu dipenuhi dalam pembangunan pendidikan bagi masyarakat petani tradisional di kabupaten Pamekasan, yakni: (1) aspek sosial-budaya, (2) aspek ekonomi, dan (3) aspek keagamaan (religiositas).

Dari aspek sosial-budaya, pembangunan pendidikan berarti bagaimana mendidik anak-anak mereka agar "pintar" membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia atau tidak "buta huruf". Dengan kemampuan membaca dan menulis masyarakat berharap agar anak-anaknya bisa memiliki pergaulan yang lebih luas, mengerti kalau ada orang lain berbicara dalam bahasa Indonesia, serta tidak akan dibohongi orang lain. Namun demikian, tidak seluruh petani berpikiran seperti itu, sebab ada pula yang berharap dengan memasukkan anaknya ke "SD pemerintah"--menurut istilah masyarakat setempat--agar bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi--bahkan bila mungkin dan ada biaya--hingga perguruan tinggi yaitu IAIN (STAIN Pamekasan).

Di lain pihak, pendidikan dipandang penting sebagai sarana bagi peningkatan status sosial (menjadi pegawai negeri). Bagi masyarakat setempat, walaupun menjadi pegawai negeri mungkin secara ekonomis penghasilannya tidak seberapa besar, tetapi dapat dikatakan pasti sebab setiap bulan akan mendapatkan gaji dan apabila sudah pensiun pun juga masih mendapatkan gaji atau pensiunan. Dalam pandangan mereka, kedudukan dan peran seorang pegawai negeri masih dihormati, walaupun sudah tidak seperti ketika profesi ini pertama kali dikenal oleh masyarakat desa (antara tahun 1960an hingga 1970). Penghormatan dan penghargaan kepada seorang pegawai negeri dalam kultur masyarakat petani tradisional di Pamekasan masih dipandang sebagai "*simbol kehormatan*" atau keberhasilan menaiki status sosial yang lebih tinggi. Dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan status dan peran seorang pegawai negeri masih dinisbahkan kepadanya. Kesan yang dapat ditangkap dari pernyataan di atas adalah bahwa pendidikan secara sosial-budaya harus mampu membantu siswa agar kelak dapat mengangkat derajat orang tua dan keluarganya, membelajarkan siswa tentang arti kemandirian dan tidak tergantung pada orang tua setelah dewasa.

Selain itu, membangun masyarakat dan desanya melalui pendidikan, bagi masyarakat setempat tidak berarti mengubah orientasi masyarakat dari kehidupan komunalnya, melepaskan masyarakat dari akar-akar tradisi yang telah membuatnya tetap hidup dan berkembang. Dalam konteks ini, ada hal mendasar yang dilupakan oleh pemerintah ketika SD-SD Inpres dibangun di seluruh pelosok pedesaan. Pemerintah selama ini terlalu bersemangat untuk "segera mengubah pola pikir dan sikap masyarakat desa". Pada taraf tertentu mungkin itu bisa dilihat sebagai "sukses pendidikan modern", tetapi di sisi lain, sikap tradisionalisme masyarakat pedesaan tidak dapat menerima sepenuhnya, sehingga melahirkan keacuhan, ketidakpedulian, bahkan kecurigaan yang kurang menguntungkan bagi SD. Di masa lalu, ketakacuhan masyarakat disebabkan oleh pandangan masyarakat desa bahwa para guru SD adalah "kaki tangan Golkar". Di masa sekarang kurangnya partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan sekolah justru lahir dari sikap para guru SD itu sendiri. Muncul kesan dari masyarakat bahwa guru SD sekarang "kurang mencintai siswanya", "datang ke sekolah terlambat", dan "sering tidak masuk ke sekolah". Beberapa orang tua siswa mengeluhkan bahwa anaknya hingga kelas III SD ternyata belum lancar atau fasih membaca dan menulis, apalagi menghitung.

Sejumlah keprihatinan di atas, menggambarkan sebuah "*paradoks pendidikan*". Di saat pemerintah Indonesia dengan penuh semangat dan ambisius untuk membangun pendidikan, tetapi pada saat bersamaan masyarakatpun terbangun dari kesadarannya betapa pendidikan telah mengalami kemunduran. Pendidikan telah kehilangan pijakan dasarnya yang berorientasi pada siswa dan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Suasana kekeluargaan yang saling mengakui eksistensi masing-masing (*co-existence*) kini mulai renggang. Selain itu, ditemukan pula kesan kekurangsetujuan di kalangan masyarakat pedesaan setempat, bahwa partisipasi harus selalu diukur dari "mau tidaknya mereka menyumbang dalam bentuk uang kepada sekolah". Bagi mereka, partisipasi berarti "bagaimana para orang tua atau masyarakat memiliki kepercayaan, kepedulian penuh terhadap sekolah". Satu hal yang dipandang paling penting untuk mendukung berbagai program pembangunan pendidikan melalui SD menurut mereka adalah "kembalikan kepercayaan dan kepedulian masyarakat, apabila pendidikan ingin menyatu di dalam diri masyarakat desa yang bersangkutan".

Dari aspek ekonomis, pembangunan pendidikan diharapkan "tidak menambah beban pengeluaran keluarga". Persepsi inilah yang kemudian mengakibatkan jumlah anak yang bersekolah di SD (APK) semakin berkurang dan tidak pasti. Menurut informasi masyarakat setempat dan hasil observasi di sebuah SD pedalaman pedesaan rata-rata "setiap kelas paling banyak hanya terdapat 10 orang siswa, dan dari jumlah yang 10 orang itu belum tentu setiap hari rajin masuk sekolah. Paling tidak kalau dibuat rata-rata, setiap hari praktis hanya 2-4 orang yang masuk sekolah". Bahkan ada kelas yang secara definitif "hanya memiliki 1-2 siswa. Itu pun tidak seluruhnya menamatkan sekolah". Kasus-kasus putus sekolah karena sang anak akan dikawinkan (dalam usia muda) oleh orang tuanya, untuk membantu bekerja di sawah, atau karena orang tua mereka tidak mampu lagi membiayai biaya sekolah anaknya, banyak terjadi di SD-SD pedesaan tradisional di kabupaten Pamekasan.

Masyarakat memandang bahwa "anak sebagai aset ekonomi keluarga", sehingga setiap upaya pembangunan pendidikan mau tidak mau perlu mendukung optimalisasi aset ekonomi keluarga itu. Konsekuensinya adalah bahwa pendidikan di SD-SD pedesaan perlu menyisipkan variabel keterampilan-keterampilan dasar yang bisa digunakan oleh siswa di dalam hidup kesehariannya. Aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang mayoritas bergerak di bidang pertanian sawah tadah hujan dan karenanya sarat tenaga kerja, sementara biaya untuk mengupah orang lain tidak selalu dapat diadakan, maka pilihan satu-satunya bagi mereka adalah melibatkan anak-anak mereka yang masih bersekolah untuk membantu usaha ekonomi keluarga mereka. Harapan masyarakat agar SD juga memberikan matapelajaran sisipan atau dalam bentuk ekstrakurikuler yang dapat lebih mengenalkan para siswa terhadap jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat di pedesaan, apalagi bisa memungkinkan anak bisa membantu memudahkan pekerjaan orang tuanya merupakan sesuatu yang dipandang wajar dan perlu diakomodasi oleh SD atau pembangunan pendidikan secara keseluruhan.

Dari aspek keagamaan (religiositas), masyarakat setempat memandang bahwa pengurangan jumlah jam pertemuan Pendidikan Agama Islam di SD hingga tinggal 2 kali pertemuan per minggu melahirkan fenomena paradoks dalam pembangunan pendidikan. Artinya, tingginya sikap penghormatan masyarakat terhadap SD tidak sebanding dan tidak sepenuhnya mampu mengubah penilaian masyarakat terhadap keberadaan SD di daerahnya, namun juga tidak serta-merta menolak kehadirannya. Kecenderungan masyarakat yang orientasi "keagamaan" masih sangat kental, serta betapa sekolah-sekolah keagamaan tetap menjadi rujukan dalam pendidikan anak-anak mereka, berimplikasi bahwa pembangunan pendidikan di pedesaan perlu mengurangi dan bahkan menghilangkan bias-bias sosial-keagamaan. Ambisi pemerintah dengan menempatkan pendidikan sebagai semata-mata untuk "mencerdaskan anak bangsa" yang mengabaikan perasaan religiositas yang masih sangat kental di dalam kehidupan masyarakat petani tradisional, bukan hanya tidak memungkinkan pendidikan efektif sebagai

instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi lebih dari itu sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan, kepedulian dan dukungan kembali dari masyarakat di daerah-daerah pedesaan kabupaten Pamekasan.

Dalam kondisi demikian, keberadaan SD masih tetap diterima tetapi dengan "kecurigaan", kurang acuh, dan menunjukkan tingkat partisipasi yang masih rendah. Bahkan, di desa-desa tertentu di kabupaten Pamekasan, masih terdapat *stigma* yang kurang baik terhadap pegawai negeri terutama guru SD. Namun sebenarnya hal ini karena kekurangmengertian sebagian anggota masyarakat terhadap tujuan pemerintah. Munculnya stigma ini terutama berkaitan dengan matapelajaran sejarah (IPS) yang di dalamnya berisi pelajaran tentang perkembangan kerajaan dan agama Hindhu, Budha dan Kristen di Indonesia. Adanya pelajaran ini oleh masyarakat dianggap sengaja dilakukan di SD untuk mengajarkan dan mengajak anak-anak mereka masuk agama-agama tersebut. Kasus ini mengakibatkan munculnya tuntutan dari seorang tokoh masyarakat agar menutup SD itu, atau menghilangkan pelajaran yang berkaitan dengan agama non-Islam. Fanatisme agama seperti ini masih ditemukan di desa-desa tradisional yang berada jauh di pelosok pedalaman kabupaten Pamekasan.

Namun, dalam kaitan ini, tidak ditemukan fakta bahwa rendahnya kepedulian, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat setempat terhadap keberadaan SD di daerah mereka, karena masyarakat lebih berhasrat atau mempercayai lembaga pendidikan lain seperti madrasah atau pondok pesantren (*pondhuk*). Sebab, walaupun terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan masrasah, namun mereka tetap menyadari bahwa pendidikan umum di SD tetap penting untuk kepentingan dunia, sedangkan pendidikan agama (pesantren, *langgar*, atau madrasah) lebih pada kepentingan akhirat. Masyarakat menyekolahkan anaknya di SD pada pagi hari, dan menyekolahkan/ memondokkan anaknya pada siang, sore atau malam hari. Salah bila ada pendapat yang mempertentangkan kedua jenis lembaga pendidikan tersebut. Keberadaan pondok pesantren dan masrasah yang murni didirikan oleh masyarakat bukanlah sebagai penyebab utama dari kurangberhasilan misi pembangunan pendidikan SD di daerah-daerah pedesaan. Para tokoh masyarakat dan terutama para kiai pemimpin madrasah dan ponpes pun tidak berkeberatan/menolak terhadap kehadiran SD di daerah mereka, yang penting dan harus dijaga oleh para pegawai pendidikan--menurut istilah mereka--adalah bagaimana "mereka dapat menjaga hubungan baik antara madrasah dan ponpes. Apabila mereka dapat melakukannya, maka insyaallah keberhasilan pendidikan (SD) di daerah pedesaan kabupaten Pamekasan dapat dicapai".

Atas dasar itu, membangun melalui ekspansi sistem pendidikan modern, bagi masyarakat setempat tidak berarti mengubah orientasi mereka dari kehidupan komunalnya, melepaskan masyarakat dari akar-akar tradisi yang telah membuatnya tetap hidup dan berkembang. Dalam kaitan ini, ada hal mendasar yang dilupakan oleh pemerintah ketika SD-SD Inpres dibangun di seluruh pelosok pedesaan. Pemerintah terlalu bersemangat untuk "segera mengubah pola pikir dan sikap masyarakat desa". Pada taraf tertentu mungkin itu bisa dilihat sebagai "sukses pendidikan modern", tetapi di sisi lain, sikap tradisionalisme masyarakat pedesaan tidak dapat menerima sepenuhnya, sehingga melahirkan keacuhan, ketidakpedulian, bahkan kecurigaan yang kurang menguntungkan bagi SD. Di masa lalu, ketakacuhan masyarakat disebabkan oleh pandangan masyarakat desa bahwa para guru SD adalah "kaki tangan Golkar". Kesan tersebut hingga kini masih membekas pada sebagian masyarakat, terutama di desa-desa yang memiliki madrasah dan pondok pesantren. Di masa sekarang kurangnya partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan sekolah justru lahir dari sikap para guru SD itu sendiri. Muncul kesan dari masyarakat bahwa para guru SD "sekarang kurang mencintai siswanya". "datang ke sekolah terlambat", "sering tidak masuk ke sekolah". akibatnya, beberapa orang tua siswa mengeluhkan bahwa anaknya hingga kelas III SD ternyata belum lancar atau fasih membaca dan menulis, apalagi menghitung.

Sejumlah keprihatinan di atas, menggambarkan sebuah "paradoks pendidikan". Di saat

pemerintah Indonesia dengan penuh semangat dan ambisius untuk membangun pendidikan, tetapi pada saat bersamaan masyarakatpun terbangun dari kesadarannya betapa pendidikan telah mengalami kemunduran. Pendidikan telah kehilangan pijakan dasarnya yang berorientasi pada siswa dan masyarakat. Suasana kekeluargaan yang saling mengakui eksistensi masing-masing (*co-existence*) kini mulai renggang. Selain itu, juga terdapat kesan kekurangsetujuan di kalangan masyarakat setempat, bahwa partisipasi harus selalu diukur dari "mau tidaknya mereka menyumbang dalam bentuk uang kepada sekolah". Bagi mereka, partisipasi berarti "bagaimana para orang tua atau masyarakat memiliki kepercayaan, kepedulian penuh terhadap sekolah". Satu hal yang dipandang paling penting untuk mendukung berbagai program pembangunan pendidikan melalui SD. "Kembalikan kepercayaan dan kepedulian masyarakat, apabila pendidikan ingin menyatu di dalam diri masyarakat desa".

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pembangunan pendidikan bagi masyarakat petani tradisional di pedesaan Kabupaten Pamekasan, di satu sisi, secara kuantitatif telah menunjukkan keberhasilannya di dalam ekspansinya yang menjangkau seluruh pelosok pedesaan hingga ke puncak-puncak gunung. Pertumbuhan jumlah gedung sekolah (SD), guru, sarana dan prasarana fisik (mebeler, buku pelajaran, dan peraga) semakin meningkat dibandingkan sebelum ada kebijakan Inpres sejak tahun 1970-an. Sekalipun belum mencapai kebutuhan rasional. Di sisi lain, secara kualitatif, sekalipun telah mengalami peningkatan, tetapi masih banyak kendala yang bisa merintangai ketercapaian visi dan misi pembangunan pendidikan baik bersumber dari faktor internal, juga eksternal. Kendala internal muncul dari para pelaku pendidikan itu sendiri, baik guru, kepala sekolah, pengawas, maupun Depdiknas kecamatan. Sedangkan kendala eksternal muncul terutama karena masih lemah dan labilnya kepercayaan, kepedulian, partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar sekolah.

Pembangunan pendidikan perlu mencakup "pemberdayaan pelaku pendidikan" sendiri dan "pemberdayaan masyarakat". Kebijakan pembangunan pendidikan yang selama ini lebih cenderung diberi makna oleh pemerintah dan hanya memberikan sedikit wacana bagi masyarakat untuk turut mendiskusikan dan menyampaikan "pandangan dari bawah". Masyarakat "dipinggirkan" hampir dalam setiap keputusan pendidikan/sekolah. Guru sebagai subyek pendidikan yang terlibat penuh dalam proses pembangunan pendidikan pun hanya "samar-samar" didengar suaranya, yang pada akhirnya menjadikan diri mereka terjepit di antara polarisasi kepentingan yang merentang di dalam isu pembangunan pendidikan dan menjadi korban karenanya.

Persepsi masyarakat pedesaan di kabupaten Pamekasan sebagaimana diuraikan di atas, memberikan pemahaman bahwa di dalam semangat dan ambisi pemerintah dengan konsep pembangunan pendidikannya, terselip sikap yang mensubordinasikan posisi masyarakat desa dengan segala ke-tradisional-annya sehingga perlu "diberadabkan" (*civilized*), suatu sikap laksana "atasan" dan "bawahan" yang hanya bisa dibenarkan apabila yang menjadi atasan atau panutan itu adalah tokoh-tokoh masyarakatnya sendiri sebagai bagian integral dari kehidupan sosial budaya petani tradisional (Koentjaraningrat, 1985). Namun apabila yang menganggap "atasan" itu berasal dari lingkungan masyarakat tersebut perlu didasarkan pada kerangka hubungan yang ditegakkan atas dasar prinsip "kolegialisme" untuk ketercapaian tujuan bersama kedua belah pihak.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Dipandang perlu dibuat kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat sekolah dan kecamatan yang secara terbuka memberikan peluang kepada masyarakat petani tradisional untuk kembali mengambil posisi dan perannya dalam pembangunan

pendidikan di daerahnya, dengan senantiasa tetap mendukung "kemandirian" masyarakat atas dasar suatu kerangka pembangunan yang dipilih oleh pemerintah (Depdiknas). Hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) *merevitalisasi dan merekonstruksi BP3* sebagai "wadah kolaborasi dan partisipasi" yang selama ini "invalid" karena lebih mengedepankan aspek "penarikan dana" daripada aspek "sumbang saran dan pemikiran", serta menghindari sikap yang "interventif" dari pihak sekolah yang dapat menghilangkan kemandiriannya, (b) mengemas dan mengembang "*pertemuan berkala*" yang mengundang orang tua/tokoh masyarakat dalam rapat-rapat sekolah sebagai sarana melakukan interaksi dan transaksi program sekolah dan aspirasi orang tua/tokoh masyarakat, (c) mengemas "*program bersama*" yang dirancang bersama antara sekolah dan masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dengan memanfaatkan hari-hari besar nasional atau disesuaikan dengan program desa.

- (2) Di tingkat sekolah (SD) profesionalisme para guru dan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui pola "*pembinaan kolaboratif*" yang memungkinkan terciptanya *interactive professionalism* antarpersonal guru/kepala sekolah secara bertahap dan berjenjang dari tingkat sekolah, antar-sekolah, intra dan antar gugus sekolah, kecamatan, hingga kabupaten. Dalam pola "profesionalisme interaktif" ini, fungsi dan peran PKG dan PKG di mana para guru SD melakukan interaksi, transaksi pengalaman-pengalaman profesionalnya perlu direstrukturisasi dan direvitalisasi sebagai "laboratorium profesional" bagi pengembangan gagasan-gagasan inovatif di bidang pembelajaran. Forum KKKS sebagai wadah kepala sekolah diharapkan dapat menjadi fasilitator dan mediator yang memungkinkan adanya *deliberasi* hasil-hasil PKG dan KKG pada tingkat implementasinya di sekolah. Sementara pengawas SD dan Depdiknas kecamatan/kabupaten dapat berperan sebagai supervisor yang pro-aktif sehingga proses-proses tersebut dapat dipelihara, berlanjut dan dikembangkan.
- (3) Untuk kondisi sekarang, mengingat sebagian besar SD di lokasi penelitian belum siap, baik secara fisik, manajerial, ketenagaan, dan finansial, maka otonomi pendidikan sebaiknya dikembangkan terlebih dahulu di tingkat Kabupaten/Kecamatan dengan model MBDS (*Managemen Berbasis Daerah Setempat*) yang bertumpu pada tiga *stake-holder*, yaitu Pemda (Depdiknas), Sekolah dan Masyarakat. Untuk mendukung efektivitas, assesibilitas, dan akuntabilitas penerapan model MDDBS maka kemampuan profesional guru dan aparat Depdiknas kabupaten/kecamatan di bidang manajerial dan administrasi perlu ditingkatkan melalui penataran, pelatihan. Untuk mendukung model tersebut, apabila dimungkinkan dipandang perlu bagi para staf dan pimpinan strategis untuk mengikuti "studi lanjutan" sesuai hasil "analisis kebutuhan" daerah. Tak kalah pentingnya, adalah penuntasan "segera" penataan institusional di tingkat kecamatan/kabupaten yang hingga sekarang belum sepenuhnya tuntas. Dengan model MBDS juga diharapkan memobilisasi seluruh potensi masyarakat--yang selama ini "dimarjinalkan" dan "dikucilkan"--dapat lebih dioptimalkan bagi kepentingan pembangunan pendidikan.

Sekalipun model MDDBS dapat memunculkan berbagai "kekaburan" (*guises*) dalam pengelolaannya, namun penulis pandang lebih merefleksikan sebuah gagasan tentang bagaimana menyusun berbagai keputusan pendidikan yang bersifat partisipatoris di tingkat "*situs-lokal*". MBDS dengan pola "pengelolaan terbagi" (*shared governance*) dipandang lebih merepresentasikan suatu perubahan besar di dalam proses pembangunan pendidikan melalui pendekatan "pemecahan masalah" di tingkat kabupaten/kecamatan sebagai "*a central location*" di mana staf pendidikan bisa lebih terlibat, di samping berbagai dilema yang mungkin muncul akibat tersebarnya lokasi-lokasi sekolah. Untuk tujuan tersebut, koordinasi dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari ketiga "*stake holders*" pembangunan pendidikan sangat diperlukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bogdan, R. & Biklen, S.K. (1990). *Riset kualitatif untuk pendidikan: Pengantar ke teori dan metode*. Alih bahasa Munandir. Jakarta: PAU-UT.
- Bogdan, R. & Taylor, S.J. (1993). *Kualitatif: Dasar-dasar penelitian*, Alih bahasa A. Khosin Afandi. Jakarta: Usaha Nasional.
- Bremberck, et. al. (1966). *Social foundations of education: A cross-cultural approach*. New York: John Wiley and Sons.
- Campbell, T. (1994). *Tujuh teori sosial*. Yogyakarta: Kansius.
- Cukilan lampiran pidato kenegaraan presiden Soeharto di depan sidang DPR 16 agustus 1983. *Analisis Pendidikan*. No 4, tahun IV.
- Daldjoeni, N. & Suyitno, A. (1985). *Pedesaan, lingkungan dan pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Dep. P dan K. (1974). *Segi sosial-budaya pendidikan di Madura (tinjauan umum rencana penelitian)*. Madura I. Jakarta: Depdikbud.
- Dewey, J. (1962). *The child and the curriculum and the school and society*. 6th impression. Chicago, Illinois: The University of Chicago.
- Dirjen PMD. (1984). *Klasifikasi tipologi desa di Indonesia*. Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo. ed. *Sosiologi pedesaan*. Jilid I., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 151-170.
- Faisal, S. (1981). *Menggalang gerakan bangun diri masyarakat desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Farisi, M.I. (1998). *Orientasi nilai dalam pilihan karier profesi guru: Studi kasus pada guru wanita di kabupaten Pamekasan*. Laporan penelitian. P3M-Dikti, Depdikbud.
- Jalal, F. & Supriadi, D. (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Koentjaraningrat. (1985). *Ciri-ciri dari kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia*. Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo. ed. *Sosiologi Pedesaan*. Jilid I., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 34-43
- (1987). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lincoln, Y.S. & Egon G.G. (1985). *Naturalistic inquiry*. California: SAGE Publications, Inc.
- Miarso, J. (1983). *Suatu hasil penelitian eksploratoris model teknologi pendidikan untuk pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia*. *Analisis Pendidikan*. No. 4, Th. IV. 1-5
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L.J. (1986). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: P2TK, Depdikbud.
- Munandir. (1973). *Penyebaran dan arus murid sekolah menengah sebagai fungsi prestasi akademis dan status sosial-ekonomi*. (Disertasi tidak diterbitkan). IKIP Malang.
- Pakasi, S. (1979). *A proposed national elementary education program for Indonesia*.

Dissertation., Jakarta: Direktorat P3M, Ditjen Dikti-Depdikbud.

Passow, A.H. *ed.* (1964). *Education in depressed areas*. New York: Columbia University.

Rachman, M.A. (1986). *Mencari bentuk sekolah kejuruan yang cocok di taraf desa..* Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo. *ed.* Sosiologi Pedesaan. Jilid I., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 185-189.

Redfield, R. (1982). *Masyarakat petani dan kebudayaan*. Jakarta: CV. Rajawali.

Rogers, E.M. (1983). *Diffusion of innovations*. 3rd ed. New York: The Free Press.

Rogers, E.M. & Shoemaker, F.F. (1987). *Memasyarakatkan ide-ide baru*. Alih bahasa Abdillah Hanafi. Surabaya: Usaha Nasional.

Sanusi, A. (1992). *Pengelolaan pendidikan sentralistik birokratik harus diubah*. Dalam Media Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. No. 62, Th. XIV.

Steenbrink, K A. (1986). *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan islam dalam kurun moderen*. Jakarta: LP3ES.

Susanto, A.S. (1979). *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*. Bandung: Penerbit Binacipta.

Tilaar, H.A.R. (1999). *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional (dalam perspektif abad 21)*. Jakarta: Tera Indonesia.

Tim Peneliti. (1995). *Laporan studi kasus profil sekolah dasar di desa tertinggal di provinsi jawa timur dan nusa tenggara barat*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen, Depdikbud.

Vembriarto, ST. (1971). *Masalah-masalah pendidikan di Indonesia dewasa ini*. Basis. No. 12, Th. XX, September. 12-19.

Zimeck, M. (1986). *Pesantren dalam perubahan sosial*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.